AKUNTANSI 45
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS 45 SURABAYA
Jurnal Ilmiah Akuntansi

# Analisis Kegagalan *Corporate Governance* dalam Manipulasi Laporan Keuangan

(Studi Kasus PT Indofarma Tbk)

# *Analysis of Corporate Governance Failures in Financial Statement Manipulation*

*(Case Study of PT Indofarma Tbk)*

**Shershi Sabrina Putri[1], Nadya Ababil Faradiska[2], Yuliana Roudhotul Jannah[3], Adhista Amelia Putri[4], Ivo Valensya Prayosa[5], Putri Nur Qamarina Hasyilatul Fitriya[6], Rohmawati Kusumaningtias[7], Ambar Kusumaningsih[8]**

[1-8] Akuntansi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia,

**Penulis Korespondensi: 24080694023@mhs.unesa.ac.id*

***Abstract****. This study aims to analyze the failure of corporate governance in financial statement manipulation at PT Indofarma Tbk. The research employs a qualitative approach with a case study design and utilizes secondary data in the form of financial statements, annual reports, official documents, and investigative audit findings from the Audit Board of Indonesia (BPK). The analysis focuses on the implementation of the TARIF principles (transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness). The results indicate that the weak implementation of these principles led to ineffective supervision, increased opportunities for financial statement manipulation, and declining investor confidence as well as corporate credibility. This study emphasizes that the effectiveness of corporate governance depends not merely on formal structures, but on strong oversight and substantive implementation to prevent fraudulent financial reporting practices.*

***Keywords****: Corporate Governance; Corporate Oversight; Financial Statement Manipulation; PT Indofarma Tbk; TARIF Principles.*

**Abstrak**. Penelitian ini bertujuan menganalisis kegagalan corporate governance dalam manipulasi laporan keuangan pada PT Indofarma Tbk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dokumen resmi, serta hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan. Analisis difokuskan pada penerapan prinsip TARIF (transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penerapan prinsip-prinsip tersebut menyebabkan tidak efektifnya pengawasan, meningkatnya peluang manipulasi laporan keuangan, serta menurunnya kepercayaan investor dan kredibilitas perusahaan. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas corporate governance bergantung pada implementasi yang nyata dan pengawasan yang kuat untuk mencegah terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.

**Kata kunci**: Manipulasi Laporan Keuangan; Pengawasan Perusahaan; Prinsip TARIF; PT Indofarma Tbk; Tata Kelola Perusahaan.

## 1. LATAR BELAKANG

Laporan keuangan merupakan instrumen utama dalam sistem pasar modal yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan bagi investor, kreditor, serta pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah, manajemen, dan masyarakat (Agustin et al., 2025; Sihombing, 2021). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mampu memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi keuangan, kinerja keuangan, serta prospek usaha sehingga dapat digunakan untuk menilai risiko dan potensi keuntungan suatu investasi. Oleh karena itu, integritas dan keandalan laporan keuangan menjadi faktor krusial dalam menjaga transparansi serta kepercayaan publik terhadap perusahaan (Handajani et al.,

*Naskah Masuk: 17 Agustus 2026; Revisi: 27 September 2026; Diterima: 11 November 2026; Terbit: 25 November 2026*

2023; Nasution et al., 2026). Laporan keuangan juga sering digunakan sebagai indikator utama dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, baik bagi pihak internal maupun eksternal. Bagi investor, laporan keuangan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi, sedangkan bagi manajemen, laporan keuangan digunakan untuk mengevaluasi pencapaian target perusahaan dan menentukan kebijakan strategis di masa mendatang (Rangkuti, 2025; Simamora & Sebiring, 2018). Dengan demikian, kualitas informasi dalam laporan keuangan sangat menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap kredibilitas perusahaan.

Dalam praktiknya, kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh efektivitas penerapan corporate governance. Tata kelola perusahaan yang baik berperan dalam memastikan bahwa proses pelaporan keuangan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang berlaku. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan seperangkat mekanisme yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditur, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menciptakan nilai tambah dan menjaga akuntabilitas perusahaan (Janudin et al., 2026; Simamora & Sebiring, 2018). Mekanisme seperti dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, serta sistem pengendalian internal menjadi elemen penting dalam mengawasi kinerja manajemen serta meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan (Handajani et al., 2023; Janudin et al., 2026). Apabila mekanisme tersebut tidak berjalan secara optimal, maka peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan akan semakin besar.

Selain berorientasi pada kepentingan pemegang saham, perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat, karyawan, dan lingkungan. Oleh karena itu, corporate governance yang efektif tidak hanya berkaitan dengan pencapaian kinerja ekonomi, tetapi juga dengan transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan hubungan perusahaan dengan para stakeholder (Sembiring, 2020). Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa efektivitas corporate governance sangat menentukan kualitas laporan keuangan. Avallone et al., (2026) menyatakan bahwa lemahnya pengawasan internal memberikan ruang bagi manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Sementara itu, penelitian lain menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme tata kelola yang kuat dapat menekan praktik manajemen laba melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Dengan demikian, corporate governance tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengawasan, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan terhadap kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, penerapan corporate governance di perusahaan publik belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini tercermin dari masih ditemukannya kasus

manipulasi laporan keuangan pada perusahaan yang secara formal telah memiliki struktur tata kelola yang lengkap. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan struktur corporate governance saja tidak cukup, melainkan diperlukan efektivitas dalam pelaksanaannya. Hal ini tercermin dari masih ditemukannya kasus manipulasi laporan keuangan pada perusahaan yang secara formal telah memiliki struktur tata kelola yang lengkap. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan struktur corporate governance saja tidak cukup, melainkan diperlukan efektivitas dalam pelaksanaannya.

Manipulasi laporan keuangan merupakan salah satu bentuk kecurangan korporasi (financial statement fraud) yang dapat merugikan berbagai pihak (Rahayu, 2023). Praktik ini umumnya dilakukan melalui rekayasa pencatatan akuntansi, pengakuan pendapatan yang tidak tepat, maupun manipulasi terhadap aset dan kewajiban guna menampilkan kinerja perusahaan yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebenarnya (Dechow et al., 1996). Dalam konteks ini, kelemahan corporate governance sering kali menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya manipulasi tersebut, terutama ketika fungsi pengawasan tidak berjalan secara efektif. Selain itu, manajemen perusahaan juga memiliki kecenderungan untuk melakukan praktik earnings management sebagai upaya untuk memenuhi target kinerja tertentu. Praktik ini muncul akibat adanya fleksibilitas dalam standar akuntansi yang dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk memodifikasi angka laba. Penelitian menunjukkan bahwa tekanan kinerja serta insentif manajerial menjadi faktor pendorong utama munculnya praktik tersebut (Dechow et al., 1996). Dalam kondisi corporate governance yang lemah, fleksibilitas tersebut dapat disalahgunakan sehingga menurunkan kualitas pelaporan keuangan.

Fenomena tersebut dapat dilihat pada kasus PT Indofarma Tbk sebagai salah satu perusahaan BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2023 menemukan adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan dan pencatatan pendapatan, biaya, serta investasi yang dilakukan oleh perusahaan bersama anak perusahaannya. Ketidakwajaran tersebut terjadi dalam periode 2020 hingga semester pertama tahun 2023 dan berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp371,8 miliar (Victoria, 2025). Nilai tersebut tergolong signifikan dalam konteks keuangan perusahaan serta berdampak pada negara sebagai pemegang saham. Meskipun demikian, dalam skala ekonomi nasional, nilai tersebut tidak bersifat dominan, namun tetap mencerminkan adanya kelemahan dalam penerapan corporate governance yang berpotensi merugikan kepentingan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya.

Kasus PT Indofarma Tbk tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga menimbulkan dampak non-finansial yang tidak kalah penting. Terjadinya manipulasi laporan keuangan menyebabkan menurunnya kepercayaan investor terhadap perusahaan, yang tercermin dari penurunan harga saham serta suspensi perdagangan saham dalam periode tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak manipulasi laporan keuangan tidak hanya terbatas pada kerugian dalam bentuk nominal, tetapi juga mencakup kerusakan reputasi perusahaan, terganggunya keberlangsungan usaha, serta melemahnya kredibilitas perusahaan di pasar modal. Dalam kasus ini, regulasi dan penegakan hukum berperan sebagai faktor pendukung dalam memperkuat penerapan corporate governance. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana mekanisme tata kelola internal perusahaan dijalankan. Tanpa adanya pengawasan yang efektif serta komitmen dari manajemen, keberadaan regulasi tidak akan mampu mencegah terjadinya manipulasi laporan keuangan secara optimal. Dengan demikian, fenomena manipulasi laporan keuangan menunjukkan bahwa keberadaan struktur corporate governance secara formal belum tentu menjamin efektivitas pengawasan dalam praktik.

Kasus PT Indofarma Tbk menjadi contoh nyata bagaimana kelemahan dalam penerapan tata kelola perusahaan dapat berdampak pada menurunnya kualitas pelaporan keuangan serta kepercayaan publik terhadap perusahaan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya memahami secara lebih mendalam bagaimana mekanisme corporate governance dijalankan, khususnya dalam situasi perusahaan yang menghadapi tekanan kinerja. Dalam konteks tersebut, pendekatan kualitatif menjadi relevan karena mampu menggali secara lebih komprehensif dinamika yang terjadi di dalam perusahaan, termasuk interaksi antar mekanisme tata kelola, peran aktor internal, serta kondisi yang memungkinkan terjadinya manipulasi laporan keuangan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan corporate governance dalam kaitannya dengan manipulasi laporan keuangan melalui studi kasus pada PT Indofarma Tbk. Analisis difokuskan pada identifikasi kelemahan mekanisme pengawasan internal, peran struktur tata kelola perusahaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya penyimpangan dalam pelaporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan implikasi terkait penguatan corporate governance guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan serta mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara principal (pemilik) dan agen (manajemen) yang sering berpotensi menimbulkan konflik kepentingan akibat adanya asimetri informasi (Jensen & Meckling, 1976). Pemisahan antara pemilik pemegang saham dengan manajemen juga sering menimbulkan konflik yang disebabkan karena adanya ketidaksepakatan tujuan dan kepentingan antara kedua belah pihak (Saragih, 2021). Dalam hubungan ini, manajemen sebagai agen memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan pemilik, sehingga berpotensi melakukan tindakan oportunistik seperti manipulasi laporan keuangan. Maka dari itu, seperti yang dikatakan oleh Sari et al., (2025) diperlukan mekanisme pengawasan untuk mengurangi potensi konflik ini. Salah satu caranya adalah melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

Penelitian Rahayu (2023) menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme *corporate governance* dapat meningkatkan risiko terjadinya kecurangan laporan keuangan. Dengan demikian, teori keagenan menjelaskan bahwa konflik kepentingan dan asimetri informasi menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya manipulasi laporan keuangan.

### Stakeholder Theory

Teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik (*shareholder*), tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti investor, kreditor, karyawan, pemerintah, dan masyarakat (Freeman & McVea, 2001). Jika Bahwa semakin kuat hubungan korporasi, maka akan semakin baik bisnis korporasi; sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi, maka akan semakin sulit bisnis tersebut berjalan (Sembiring, 2020) dan dalam perspektif ini, perusahaan dituntut untuk menyajikan informasi yang transparan, andal, dan adil agar dapat memenuhi kebutuhan seluruh pihak yang berkepentingan.

Ketika perusahaan gagal menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, maka hal tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip *fairness* dan *responsibility* kepada *stakeholder*. Penelitian (Zhang et al., 2021) menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan yang rendah dapat menurunkan kepercayaan stakeholder serta meningkatkan risiko kerugian bagi pihak-pihak yang bergantung pada informasi tersebut. Dengan demikian, teori *stakeholder* menjelaskan bahwa manipulasi laporan keuangan mencerminkan kegagalan perusahaan dalam menjaga keseimbangan kepentingan *stakeholder*, sehingga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik dan kredibilitas perusahaan di pasar.

## *Corporate Governance* dan Prinsip TARIF

Tata Kelola perusahaan (*Good Corporate Governance)* merupakan sistem, struktur dan prosedur yang mengatur bagaimana sebuah bisnis dapat dijalankan demi mencapai nilai maksimal bagi pemegang saham dan keberlanjutan bagi para pemangku kepentingan. Sistem ini digunakan untuk meredam potensi keagenan melalui penciptaan iklim kerja yang kooperatif (Hidayah, 2023). Dengan tata kelola yang kuat, perusahaan bisa menyatukan berbagai kepentingan menjadi satu tujuan bersama yang dilandasi dengan kepercayaan. Penelitian Sembiring (2020) menegaskan bahwa mekanisme *corporate governance* seperti ukuran dewan komisaris dan proporsi direktur independen merupakan faktor penting yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, yang merupakan salah satu wujud akuntabilitas kepada *stakeholder*.

Terdapat 5 prinsip tarif menurut Susanti et al., (2025) yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency,* dan *fairness*:

**a. Transparansi (*Transparency*)**

Dimana Perusahaan properti mewujudkan transparansi dengan mempublikasikan informasi penting dan relevan secara akurat serta tepat waktu kepada para pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan melalui penerbitan Laporan Tahunan komprehensif yang mencakup kinerja finansial, operasional, hingga proyeksi bisnis masa depan sesuai standar akuntansi di Indonesia. Selain itu, perusahaan menyediakan akses informasi melalui unit *Corporate Affairs* dan mengimplementasikan mekanisme pelaporan pelanggaran anonim (*whistleblowing system*) untuk menjamin perlindungan bagi pelapor praktik tidak etis.

**b. Akuntabilitas (*Accountability)***

Prinsip akuntabilitas diterapkan melalui penciptaan struktur tata kelola yang jelas, di mana wewenang antara Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi diatur secara tegas dalam anggaran dasar. Setiap posisi karyawan memiliki uraian tugas (*job description*) dan indikator kinerja utama (KPI) yang terukur untuk mengevaluasi realisasi visi organisasi. Perusahaan juga membangun sistem pengendalian internal yang tangguh berlandaskan delapan siklus terintegrasi dari *Sarbanes-Oxley Act* (SOA) untuk mengamankan aset dan memastikan konsistensi operasional.

**c. Responsibilitas (*Responsibility*)**

Responsibilitas ditunjukkan melalui kepatuhan penuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk UU Perseroan Terbatas serta regulasi pasar modal di bursa efek domestik maupun internasional. Perusahaan secara proaktif menjalankan tanggung jawab sosial (CSR) yang mencakup bantuan kemanusiaan, pelestarian lingkungan, dan kegiatan keagamaan sesuai dengan koridor undang-undang. Selain itu, komitmen terhadap kesejahteraan karyawan diperkuat melalui penegakan protokol kesehatan dan keselamatan kerja, serta pengintegrasian manajemen risiko ke dalam kerangka tata kelola perusahaan.

**d. Independensi (*Independency*)**

Independensi memastikan bahwa setiap organ perusahaan berfungsi secara mandiri tanpa adanya intervensi atau dominasi dari pihak luar maupun pihak terafiliasi. Anggota manajemen diwajibkan menjalankan tugasnya secara objektif, bebas dari pengaruh hubungan kekerabatan atau kepentingan pejabat pemerintahan. Dewan Komisaris dan Komite Audit memiliki otoritas penuh untuk mengakses dokumen perusahaan serta dapat menunjuk tenaga ahli independen guna menjamin integritas dalam pengambilan keputusan strategis.

**e. Kewajaran (*Fairness*)**

Prinsip ini menjamin bahwa seluruh pemegang saham dalam klasifikasi yang sama mendapatkan perlakuan setara, termasuk hak suara dalam RUPS dan hak atas dividen. Dalam manajemen sumber daya manusia, perusahaan menerapkan asas non-diskriminasi gender dan suku dalam proses rekrutmen hingga terminasi. Selain itu, perusahaan mengadopsi pola meritokrasi (merit system) di mana penghargaan dan sanksi diberikan murni berdasarkan kapabilitas serta kinerja aktual karyawan dengan berlandaskan nilai budaya.

**Manajemen Laba (*Earnings Management*)**

Manajemen laba *(Earnings Management)* merupakan tindakan manager perusahaan dalam manipulasi informasi dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja perusahaan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Praktik ini biasanya dilakukan dengan mengotak-atik pos akrual, dan hal ini dimungkikan dikarenakan akrual bersifat fleksibel dan tidak membutuhkan aliran kas masuk atapun keluar secara rill, sehingga penyusunan laporan keuangan bisa menyesuaikan angka-angkanya tanpa perlu menyediakan bukti seperti uang tunai. (Saragih & Sembiring, 2019) mendefinisikan perataan laba (*income smoothing*) sebagai salah satu bentuk manajemen laba yang bertujuan

mengurangi fluktuasi laba agar terlihat stabil, dan menyebutkan bahwa praktik ini dapat dipengaruhi oleh faktor *corporate governance*, *leverage*, dan ukuran perusahaan.

Menurut Dechow et al., (1996) istilah *earnings management*, manipulasi, dan salah saji (*misstatement*) digunakan secara bergantian, yang menunjukkan bahwa praktik ini berkaitan dengan penyimpangan dalam laporan keuangan. Selain itu, penelitian Avallone et al., (2026) menunjukkan bahwa pengendalian pelaporan keuangan yang efektif berperan dalam membatasi praktik manajemen laba. Dengan demikian, manajemen laba dapat dipengaruhi oleh fleksibilitas akuntansi serta efektivitas pengendalian dalam perusahaan, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas laporan keuangan.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual, khususnya terkait praktik *corporate governance* dan pelaporan keuangan dalam suatu perusahaan (Creswell, 2009; Sugiyono, 2013). Desain studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada analisis mendalam terhadap satu objek tertentu, yaitu PT Indofarma Tbk, sehingga dapat menggambarkan kondisi nyata yang terjadi serta implikasinya terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah praktik pelaporan keuangan dan penerapan *corporate governance* pada PT Indofarma Tbk, dengan fokus pada identifikasi kegagalan mekanisme pengawasan dalam pelaporan keuangan, dalam periode 2019–2025. Pemilihan objek penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Kasus PT Indofarma Tbk dipilih karena relevan dengan isu manipulasi laporan keuangan dan memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan investor serta pasar modal.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen atau sumber yang telah tersedia (Creswell, 2009;Sugiyono, 2013). Sumber data dalam penelitian ini meliputi laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit, laporan tahunan (annual report), peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), serta literatur akademik seperti jurnal ilmiah dan buku teks yang relevan dengan corporate governance dan pelaporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai sumber utama dalam mengidentifikasi indikasi penyimpangan dan

manipulasi laporan keuangan. Data tambahan juga diperoleh dari publikasi resmi dan sumber terpercaya lainnya yang mendukung analisis penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa laporan keuangan, laporan tahunan, serta dokumen resmi perusahaan (Sugiyono, 2013). Sementara itu, studi literatur digunakan untuk memperoleh landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti (Creswell & Creswell, 2009). Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Mengacu pada tahapan analisis data kualitatif menurut (Sugiyono, 2013), langkah-langkah analisis meliputi: (1) reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data yang relevan dengan fokus penelitian; (2) penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami; dan (3) penarikan kesimpulan yang dilakukan secara sistematis berdasarkan temuan yang diperoleh.

Dalam penelitian ini, data laporan keuangan dan informasi terkait dianalisis untuk mengidentifikasi indikasi ketidaksesuaian dalam pelaporan serta mengevaluasi penerapan corporate governance dan kegagalannya dalam mencegah manipulasi laporan keuangan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara praktik corporate governance dan kualitas pelaporan keuangan, khususnya dalam kasus PT Indofarma Tbk.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness)* PT Indofarma Tbk.

Dalam praktik tata kelola perusahaan, prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan keadilan merupakan elemen penting dalam menjaga kualitas pelaporan keuangan. Dalam perspektif *agency theory* (Jensen & Meckling, 1976) konflik kepentingan antara agen dan *principal* menimbulkan *agency cost* yang dapat ditekan melalui mekanisme monitoring dan bonding. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas dipandang sebagai bentuk mekanisme tersebut dalam praktik tata kelola perusahaan. Apabila kedua prinsip ini tidak berjalan secara efektif, maka potensi terjadinya manipulasi laporan keuangan akan semakin meningkat.

Transparansi merupakan keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, termasuk dalam penetapan tarif dan pengelolaan dana Perusahaan (Susanti et al., 2025). Dalam kasus PT Indofarma Tbk, prinsip transparansi tidak tercermin secara memadai dalam praktik pengelolaan perusahaan. Hal ini dibuktikan melalui

Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengungkap adanya berbagai ketidakwajaran dalam kegiatan transaksional dan pengelolaan dana perusahaan (BPK Kaltim, 2024). Temuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan yang berpotensi merugikan perusahaan, bahkan BPK secara spesifik menyebutkan kerugian negara mencapai Rp 371,83 miliar (Agata et al., 2025).

Kondisi ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan yang disajikan tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi ekonomi perusahaan, sehingga terjadi distorsi dalam penyajian informasi keuangan. Selain itu, keterlambatan dalam penyampaian informasi material kepada publik semakin memperkuat adanya permasalahan dalam keterbukaan informasi, yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Presiden Republik Indonesia, 1995). Situasi tersebut mencerminkan tingginya asimetri informasi, di mana manajemen memiliki kendali yang lebih besar atas informasi dan berpotensi memanfaatkannya untuk membentuk persepsi kinerja perusahaan di mata investor.

*Accountability* (Akuntabilitas) adalah kewajiban manajemen untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan kinerja perusahaan kepada pemegang saham. Dalam perspektif Akuntabilitas permasalahan pada PT Indofarma Tbk tercermin dari tidak efektifnya mekanisme pertanggungjawaban manajemen dalam mengelola dan melaporkan keuangan perusahaan. Meskipun perusahaan telah memiliki struktur dalam perangkat *corporate governance* seperti dewan komisaris, komite audit, dan sistem pengendalian internal, keberadaan mekanisme tersebut tidak diikuti dengan pelaksanaan fungsi pengawasan yang optimal. Tidak terdeteksinya berbagai penyimpangan dalam laporan keuangan menunjukkan bahwa proses monitoring dan evaluasi terhadap kinerja manajemen tidak berjalan sebagaimana mestinya (Susanto et al., 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas yang seharusnya menjadi alat kontrol justru bersifat formalitas administratif, di mana pertanggungjawaban dilakukan tanpa diiringi pengawasan yang substantif. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik tanpa adanya pengendalian yang efektif.

Selain itu, lemahnya akuntabilitas juga terlihat dari kegagalan dalam memastikan keandalan dan integritas laporan keuangan yang disajikan kepada pemangku kepentingan. Padahal, direksi memiliki tanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan keuangan sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Presiden Republik Indonesia, 2007). Ketika fungsi pertanggungjawaban tidak berjalan dengan baik, maka potensi penyimpangan menjadi semakin besar dan sulit untuk dikendalikan.

Responsibility (tanggung jawab) adalah kewajiban manajemen untuk menjalankan dan melaporkan kegiatan perusahaan sesuai dengan standar akuntansi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pada kasus pada PT Indofarma Tbk menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi dan juga regulasi yang berlaku. Sebagai perusahaan publik, laporan keuangan seharusnya disusun secara wajar dan selalu mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Namun, adanya ketidakwajaran dalam pencatatan dan pengelolaan transaksi menunjukkan bahwa informasi yang disajikan tidak sepenuhnya mencerminkan realitas ekonomi. Kondisi ini mengindikasikan prinsip penyajian keuangan yang andal dan transparan tidak terpenuhi. Selain itu, tindakan yang dilakukan tersebut tidak sejalan dengan tanggung jawab direksi yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga kondisi tersebut mencerminkan lemahnya pelaksanaan tanggung jawab dan pengelolaan perusahaan (Presiden Republik Indonesia, 2007).

Dalam kondisi pengawasan yang tidak efektif, manajemen memiliki ruang untuk bertindak oportunistik, termasuk dalam memodifikasi laporan keuangan guna menampilkan kinerja yang lebih baik (Vinny & Febyansyah, 2025). Pola ini tercermin dari adanya ketidakwajaran pencatatan keuangan yang kemudian berujung pada proses hukum terhadap pihak manajemen, sehingga menunjukkan bahwa prinsip pertanggungjawaban belum dijalankan secara optimal. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari lemahnya independency (independensi) dalam mekanisme pengawasan.

*Independency* (independensi) merupakan kondisi di mana pihak pengawas bertindak secara objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Dalam struktur corporate governance, independensi dewan komisaris, komite audit, dan auditor eksternal seharusnya berfungsi sebagai pengimbang terhadap kekuasaan manajemen. Namun, fakta bahwa manipulasi laporan keuangan dapat berlangsung dalam periode tertentu menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tersebut belum berjalan secara efektif. Meskipun standar audit seperti SA 240 yang membahas tanggung jawab auditor terkait kecurangan telah menegaskan peran auditor dalam mendeteksi risiko kecurangan, efektivitasnya tetap sangat bergantung pada independensi dan kualitas pelaksanaan pengawasan tersebut.

Kelemahan independency ini menjadi semakin krusial. Hal ini sejalan dengan temuan Saragih & Sembiring, (2019) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap perataan laba, yang mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen belum tentu efektif jika tidak didukung oleh independensi dan mekanisme pengawasan yang kuat. Dalam kasus, penjatuhan sanksi pidana terhadap pihak manajemen menunjukkan bahwa pelanggaran dalam pelaporan keuangan memiliki

konsekuensi hukum yang serius. Namun, kondisi tersebut juga mengindikasikan bahwa penegakan hukum masih cenderung bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah terjadinya pelanggaran dan kerugian. Lingkungan penegakan hukum yang belum optimal cenderung belum mampu sepenuhnya mencegah praktik manipulasi laporan keuangan sejak awal (Tchuigoua, 2026).

Fairness (kewajaran) merupakan prinsip yang menekankan perlakuan yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi. Dalam konteks ini, dampak dari lemahnya tata kelola perusahaan tercermin pada terganggunya aspek fairness dalam penyampaian informasi. Laporan keuangan yang telah dimanipulasi tidak lagi mampu memberikan informasi yang adil bagi para pemangku kepentingan. Investor dan kreditor kehilangan dasar yang objektif dalam mengambil keputusan, sementara pemegang saham minoritas menjadi pihak yang paling rentan dirugikan. Dalam kerangka Stakeholder Theory, perusahaan seharusnya menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Teori ini menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan (Freeman & McVea, 2001). Oleh karena itu, penyajian informasi yang tidak wajar mencerminkan kegagalan dalam memenuhi prinsip keadilan tersebut (Zhang et al., 2021).

Ketidakadilan informasi tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap perusahaan dan kredibilitas pasar modal. Hal ini menegaskan bahwa manipulasi laporan keuangan bukan sekadar persoalan teknis akuntansi, melainkan refleksi dari kegagalan tata kelola perusahaan yang diperparah oleh belum optimalnya efektivitas penegakan hukum.

Dari kasus PT Indofarma Tbk ini menunjukan bahwa kegagalan dalam penerapan prinsip-prinsip corporate governance tidak terjadi secara parsial, melainkan saling berhubungan dan memperkuat satu sama lain. Lemahnya transparansi menyebabkan distorsi informasi keuangan, yang kemudian diperparah oleh tidak efektifnya akuntabilitas sebagai mekanisme pengendalian. Di sisi lain, rendahnya tanggung jawab dalam mematuhi standar dan regulasi, serta lemahnya independensi dalam fungsi pengawasan, semakin membuka ruang bagi terjadinya manipulasi laporan keuangan. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada hilangnya fairness dalam penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan. Dengan demikian, permasalahan pada PT Indofarma Tbk tidak hanya mencerminkan kegagalan pelaporan keuangan, tetapi juga kelemahan dalam tata kelola perusahaan secara keseluruhan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan transparansi, serta penegakan akuntabilitas dan independensi agar praktik serupa tidak terulang.

**Implikasi Penerapan *Corporate Governance***

Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan corporate governance pada PT Indofarma Tbk perlu dilakukan secara bertahap dan saling mendukung satu sama lain, dengan menempatkan transparansi sebagai pondasi utama yang kemudian didukung oleh aspek pengawasan independensi, budaya organisasi, dan penegakan hukum.

Langkah awal yang krusial adalah peningkatan transparansi melalui penyajian informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Transparansi yang baik akan mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan, sehingga menjadi dasar terciptanya sistem pengawasan yang efektif. Transparansi tersebut dengan penguatan fungsi pengawasan internal, khususnya oleh dewan komisaris dan komite audit. Fungsi pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi perlu diarahkan pada pengendalian yang substantif agar mampu mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan sejak dini.

Dalam mendukung efektivitas pengawasan, independensi organ tata kelola juga perlu diperkuat karena penting untuk memastikan bahwa setiap proses pengambilan keputusan dan fungsi kontrol berjalan secara objektif, bebas dari konflik kepentingan, serta tidak dipengaruhi oleh tekanan internal maupun eksternal. Penguatan struktur dan mekanisme tersebut harus diiringi dengan internalisasi budaya etika organisasi. Nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab perlu ditanamkan secara konsisten agar tidak hanya menjadi aturan formal, tetapi juga menjadi pedoman perilaku dalam setiap aktivitas operasional perusahaan.

Pada akhirnya, seluruh upaya internal tersebut perlu didukung oleh sistem penegakan hukum yang efektif dari pihak eksternal. Penegakan hukum yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif, akan menciptakan efek jera sekaligus memperkuat disiplin perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip corporate governance. Dengan demikian, implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa perbaikan corporate governance harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui sinergi antara transparansi, pengawasan, independensi, budaya etika, dan penegakan hukum.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa manipulasi laporan keuangan pada PT Indofarma Tbk merupakan konsekuensi dari lemahnya penerapan *corporate governance* yang terjadi secara menyeluruh, bukan hanya pada satu aspek tertentu. Kegagalan dalam menjalankan prinsip-prinsip TARIF (*tarif, accountability, responsibility, independency,* dan *fairness*)

saling berkaitan dan memperkuat terjadinya distorsi dalam pelaporan keuangan. Lemahnya transparansi menyebabkan informasi keuangan tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, yang kemudian diperparah dengan tidak efektifnya akuntabilitas dan pengawasan internal. Di sisi lain, rendahnya *responsibility* serta independensi dalam struktur tata kelola memberikan ruang bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik, termasuk manipulasi laporan keuangan dan praktik *earning management.*

Dampak dari kondisi tersebut tidak hanya terbatas pada kerugian finansial, tetapi juga mencakup menurunnya kepercayaan investor, rusaknya reputasi perusahaan, serta terganggunya stabilitas pasar modal. Dari perspektif etika, moral, dan hukum, kasus ini menunjukkan bahwa manipulasi laporan keuangan merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya disebabkan oleh kelemahan sistem pengawasan internal, tetapi juga oleh rendahnya internalisasi nilai etika dalam organisasi serta belum optimalnya efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, efektivitas corporate governance sangat bergantung pada kualitas implementasinya, bukan sekadar keberadaan struktur formal.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian ini terbatas pada penggunaan desain studi kasus yang hanya berfokus pada perusahaan, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi secara luas. Selain itu, penelitian ini tidak melibatkan wawancara langsung dengan pihak internal dan hanya menggunakan data sekunder berupa penelitian terdahulu serta publikasi media, sehingga belum mampu menggali secara mendalam mengenai dinamika internal, khususnya terkait perilaku manajemen dan budaya organisasi yang berkontribusi terhadap terjadinya manipulasi laporan keuangan. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan dengan cakupan sampel yang lebih luas agar hasil penelitian dapat memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik. Selain itu, penelitian mendatang juga disarankan untuk melibatkan metode wawancara atau studi lapangan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi internal perusahaan, khususnya terkait aspek perilaku, budaya organisasi, serta proses pengambilan keputusan manajerial yang tidak dapat diungkap hanya melalui data sekunder.

## DAFTAR REFERENSI

Agata, K. N. P., Fitriana, S. I., Putri, R. S., Kusumaningtias, R., & Kusumaningsih, A. (2025). Implementasi good corporate governance di PT Indofarma Tbk: Analisis perspektif prinsip-prinsip GCG dan teori keagenan. *Journal of Innovative and Creativity, 5*(2), 3998–4004.

Agustin, A. H., et al. (2025). Kegagalan tata kelola korporat dan dampaknya terhadap

kepercayaan publik: Studi literatur pada PT Asuransi Jiwasraya. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, *5*(3). https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i3.2266

Avallone, F., Quagli, A., Ramassa, P., & Simoni, L. (2026). The role of financial reporting controls in constraining earnings management: European evidence. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, *60*, 100761. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2026.100761

BPK Kaltim. (2024). *BPK temukan penyimpangan keuangan Indofarma, rugikan negara RP 371 M*. BPK RI. https://kaltim.bpk.go.id/bpk-temukan-penyimpangan-keuangan-indofarma-rugikan-negara-rp-371-m/

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.*

Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1996). Causes and consequences of earnings manipulation: An analysis of firms subject to enforcement actions by the SEC. *Contemporary Accounting Research*, *13*(1), 1–36. https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.1996.tb00489.x

Freeman, R. E., & McVea, J. (2001). *A stakeholder approach to strategic management* (Issue 01). University of Virginia. https://doi.org/10.2139/ssrn.263511

Gunhaerani, D., et al. (2026). Good corporate governance dan struktur kepemilikan terkonsentrasi: Analisis yuridis terhadap mekanisme perlindungan investor. *Opportunity Research and Community Service Journal*, *4*(1). https://doi.org/10.55352/13cka831

Handajani, L., Muhsyaf, S. A., & Sokarina, A. (2023). The effectiveness of corporate governance and whistleblowing system on fraud disclosure. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, *18*(1). https://doi.org/10.24843/JIAB.2023.v18.i01.p03

Hidayah, R. N. (2023). Analisis penerapan good corporate governance dalam upaya melindungi investor di pasar modal. *10*(2). https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v10i2.840

Janudin, J., et al. (2026). Pengaruh manajemen laba dan good corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan pada PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk periode 2014–2025. *Journal of Management and Creative Business*, *4*(3). https://doi.org/10.30640/jmcbus.v4i3.6974

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, *3*, 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Nasution, C. P., et al. (2026). Kegagalan good corporate governance dalam perspektif teori keagenan dan etika bisnis pada PT Asuransi Jiwasraya. *Adpertens: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, *3*(1). https://doi.org/10.63424/adpertens.v3i1.638

Presiden Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* (Issue 1).

Rahayu, D. (2023). Pengaruh mekanisme good corporate governance dan periode terjadi Covid-19 terhadap kecurangan laporan keuangan perbankan Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, *9*(3), 762–773. https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1133

Rangkuti, M. I. (2025). Analisis kegagalan manajemen risiko: Studi kasus pada PT Sri Rejeki

Isman Tbk. (Sritex). *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, *5*(3). https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i3.2455

Saragih, A. E. (2021). Pengaruh corporate governance, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap perataan laba pada perusahaan aneka industri dan kimia yang terdaftar di BEI. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, *7*(2), 100–113. https://doi.org/10.54367/jrak.v7i2.1404

Saragih, A. E., & Sembiring, Y. C. B. (2019). Pengaruh corporate governance, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, *5*(2), 139–164. https://doi.org/10.54367/jrak.v5i2.183

Sari, V. N., Wulandari, A., Saputri, N. L., Kusumaningtias, R., & Kusumaningsih, A. (2025). Pengaruh GCG terhadap ketahanan kinerja keuangan di masa Covid-19, studi: Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, *11*(2), 223–232.

Sembiring, E. R. (2020). Analisis pengaruh good corporate governance terhadap corporate social responsibility. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, *6*(2), 145–168. https://doi.org/10.54367/jrak.v6i2.1055

Sihombing, R. P. (2021). Financial statement fraud and firm performance: Empirical evidence from Indonesia. *4*(3), 824–847.

Simamora, S. R. R. A., & Sebiring, E. R. (2018). Pengaruh intellectual capital dan good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012–2015. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, *4*(1), 111–136. https://doi.org/10.54367/jrak.v4i1.455

Sugiyono, P. D. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*.

Susanti, R. E., Ratnawati, D., Bisnis, E., Veteran, U. P. N., & Timur, J. (2025). Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) pada perusahaan properti. *05*(03), 578–586. https://doi.org/10.47065/jamek.v3i1.2131

Susanto, M. E., Hastuti, T. D., & Soegijapranata, U. K. (2025). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, *14*(1), 57–74.

Tchuigoua, H. T. (2026). Does the legal enforcement environment constrain earnings management in social enterprises? Evidence from microfinance institutions. *The British Accounting Review*, *58*(1), 101684. https://doi.org/10.1016/j.bar.2025.101684

Victoria, A. O. (2025). *Arief Pramuhanto divonis 10 tahun penjara terbukti korupsi keuangan*. ANTARA. https://www.antaranews.com/berita/4903865/arief-pramuhanto-divonis-10-tahun-penjara-terbukti-korupsi-keuangan

Vinny, V., & Febyansyah, A. (2025). Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kecurangan laporan keuangan perusahaan. *14*(September), 4562–4585. https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i3.1907

Zhang, X., Tan, J., Chen, Y., & Chan, K. C. (2021). Does environmental law enforcement matter for financial reporting quality? *North American Journal of Economics and Finance*, *57*, 101445. https://doi.org/10.1016/j.najef.2021.101445